

**Judul** : Efisiensi anggaran antisipasi krisis Timteng, DPR rela potong gaji  
**Tanggal** : Kamis, 26 Maret 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Efisiensi Anggaran Antisipasi Krisis Timteng

# DPR Relu Potong Gaji

Senayan menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan memotong gaji anggota DPR dan menteri sebagai langkah efisiensi anggaran. Hal ini menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah (Timteng) yang terus berlanjut.

KETUA Komisi II DPR Rifqinizam Karsayuda mengatakan, rencana pemotongan gaji tersebut merupakan sinyal dari Presiden agar masyarakat mulai bersiap menghadapi krisis. Sebab, perang dan konflik di Timteng menyebabkan kondisi ekonomi yang tidak menentu.

"Rencana itu juga merupakan sinyal positif dan menjadi kebutuhan yang harus dilakukan saat ini," ujar Rifqi sapaan akrabnya, Rabu (25/3/2026).

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh pihak untuk melakukan penghematan penggunaan BBM. Hal itu juga telah dilakukan Pakistan saat ini, termasuk pemberlakuan bekerja dari rumah.

"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet dan anggota DPR," ujar Prabowo

dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Rifqi memandang, efisiensi tidak hanya berhenti terhadap pemotongan gaji anggota DPR, menteri, dan wakil menteri, tapi harus memastikan semua alokasi anggaran digunakan dengan tepat. "Jadi anggaran itu memiliki *output* dan *outcome* yang jelas untuk kegiatan-kegiatan pembangunan," ucapnya.

Dia menyebut, perlu ada regulasi yang dibentuk untuk mengatur dan merealisasikan rencana kepala negara untuk memotong gaji dewan hingga menteri. Tapi, tidak perlu sampai melakukan revisi undang-undang untuk membentuk payung hukum yang dibutuhkan. "Pemerintah hanya perlu melakukan dengan Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri Keuangan," usul dia.



Rifqinizam Karsayuda

Namun, ia mengingatkan, penerapan efisiensi anggaran, seperti pemotongan gaji DPR dan menteri harus dikelola secara baik, transparan, dan akuntabel. "Jangan sampai efisiensi itu justru memperlambat semangat dan pelayanan publik kepada masyarakat," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin menambahkan, bukan hanya gaji anggota DPR dan menteri yang harus dikaji ulang, tapi juga semua program dan kebijakan yang dibiayai oleh

“ Rencana itu juga merupakan sinyal positif dan menjadi kebutuhan yang harus dilakukan saat ini.

Rifqinizam Karsayuda, Ketua Komisi II DPR.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuannya untuk mencegah potensi pemborosan pada program-program yang tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat luas.

"Jadi, rasionalisasi dan evaluasi harus dilaksanakan supaya makin efektif penggunaan APBN itu," ujar Zulfikar dalam keterangannya, Rabu (25/3/2026).

Bagaimana tanggapan Pemerintah? Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Pemerintah saat ini tengah mengkaji secara detail rencana pemotongan gaji pejabat negara, menteri, hingga anggota

DPR. "Kami juga mendorong langkah efisiensi lain di lingkungan kementerian dan lembaga," ujar Prasetyo di Jakarta, kemarin.

Selain itu, Prasetyo memastikan pasokan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia masih relatif aman. Pemerintah bersama kementerian terkait dan pihak Pertamina memastikan ketersediaan stok tetap terjaga melalui sistem cadangan dan pengisian ulang yang berkelanjutan. "Kami meminta masyarakat agar tidak khawatir mengenai pasokan BBM karena stok masih aman," tutupnya. ■TIF